

Economic Bulletin – Issue 53

Pengaruh Potensi Kebijakan Non-konvensional Trump terhadap Perekonomian Indonesia

- Masa kepemimpinan kedua Trump di Amerika Serikat berpotensi memicu disrupsi besar dalam perdagangan global, dengan kebijakan proteksionis seperti perang tarif yang bisa memperburuk ketegangan dagang. Tekanan pada sistem keuangan global juga mungkin meningkat, terutama jika kebijakan fiskal AS mendorong inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi. Ketidakpastian makroekonomi yang ditimbulkan dapat berdampak langsung pada Indonesia, memperburuk volatilitas pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- Analisis data historis dari administrasi Trump pertama menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan yang agresif dan pemotongan pajak dapat menciptakan ketidakstabilan bagi ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor ekspor. Penurunan ekspor Indonesia yang tercatat pada tahun 2018 adalah salah satu contoh langsung dari dampak perang dagang dan pembatasan impor yang diterapkan oleh AS. Selain itu, fluktuasi arus modal dan pengaruh perubahan suku bunga AS terhadap nilai tukar Rupiah semakin menunjukkan kerentanannya terhadap kebijakan ekonomi Trump.
- Langkah-langkah proaktif sangat diperlukan agar Indonesia dapat menghadapi potensi dampak negatif dari kebijakan ekonomi AS di masa mendatang. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS yang rentan terhadap kebijakan proteksionis. Penguatan ketahanan finansial domestik melalui pengelolaan cadangan devisa yang baik dan kebijakan moneter yang hati-hati akan membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ibrahim Kholilul Rohman
Ibrahim.kholilul@ifg.id
Senior Research Associate

Mohammad Alvin Prabowosunu
Alvin.prabowosuni@ifg.id
Research Associate

Afif Narawangsa Luviyanto
Afif.narawangsa@ifg.id
Research Associate

Ariel Bhaskara Haposan Sihombing
Ariel.bhaskara@ui.ac.id
Research Assistant

Latar Belakang

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tidak hanya menandai kelanjutan dari pendekatan kebijakan ekonomi yang kontroversial, tetapi juga berpotensi membawa dampak besar pada stabilitas dan pola interaksi ekonomi global. Sebagai seorang pemimpin yang dikenal dengan kebijakan proteksionis dan nasionalis, Trump kerap mengedepankan prinsip "*America First*" yang secara langsung memengaruhi dinamika perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter di berbagai negara. Kebijakan-kebijakan seperti pemberlakuan tarif perdagangan dengan China, revisi perjanjian dagang NAFTA (*North America Free Trade Agreement*) menjadi USMCA (*United States – Mexico – Canada Agreement*), serta pemotongan pajak yang agresif merupakan beberapa langkah yang menciptakan disrupsi besar di pasar global selama periode kepemimpinan pertamanya (2017–2021).

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan Trump membawa tantangan yang kompleks. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia, dengan hubungan bilateral yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi langsung, serta aliran modal. Selama periode pertama Trump, Indonesia sempat mengalami penurunan ekspor terhadap Amerika Serikat pada tahun 2018, meskipun dampaknya bersifat sementara dan perdagangan bilateral pulih di tahun-tahun berikutnya. Namun, risiko serupa bahkan lebih besar dapat muncul pada periode kedua Trump, terutama jika kebijakan seperti pemberlakuan tarif perdagangan atau pembatasan impor kembali diterapkan secara agresif. Selain itu, dampak kebijakan fiskal AS, seperti pemotongan pajak yang berpotensi meningkatkan inflasi domestik dan memaksa kenaikan suku bunga The Fed, juga dapat menimbulkan tekanan pada stabilitas nilai tukar Rupiah dan aliran modal masuk ke Indonesia.

Di sektor keuangan, perubahan kebijakan Trump sebelumnya telah memicu volatilitas yang signifikan di pasar modal global, termasuk di Indonesia. Kenaikan imbal hasil obligasi AS dan penguatan dolar AS menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang harus menghadapi tantangan menjaga daya tarik investasi portofolionya. Kombinasi dari kebijakan moneter yang ketat di AS dan ketidakpastian perdagangan global berpotensi memperburuk risiko ekonomi domestik, terutama di sektor keuangan dan investasi.

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak potensial dari kebijakan ekonomi dan perdagangan AS pada masa pemerintahan kedua Donald Trump terhadap perekonomian Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah untuk memahami bagaimana perubahan kebijakan perdagangan dan fiskal AS dapat memengaruhi sektor riil Indonesia, seperti ekspor dan investasi, serta sektor keuangan, termasuk stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan pasar modal. Analisis ini menggunakan pendekatan berbasis data historis dari periode pertama kepemimpinan Trump untuk memberikan wawasan tentang potensi risiko dan peluang yang mungkin muncul. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam memitigasi dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh kebijakan Trump.

Poin-poin Kampanye dan Realisasi Kebijakan Trump (2017-2021)

Periode kepemimpinan Donald Trump antara tahun 2017 hingga 2021 ditandai dengan berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian global. Kampanye Trump berfokus pada reformasi domestik dan kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi Amerika Serikat, namun implementasi kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang beragam (Appendix 1). Berikut adalah ringkasan kebijakan utama yang menjadi fokus kampanye dan realisasinya:

1. Ekonomi dan Perpajakan

Trump berjanji untuk melakukan pemotongan pajak secara signifikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Realisasi kebijakan ini mencakup pemotongan pajak korporasi yang sebelumnya mencapai 35% menjadi 21%. Dampak kebijakan ini lebih terasa pada perusahaan besar, sedangkan pengaruhnya terhadap rumah tangga dan individu relatif terbatas.

2. Reformasi Imigrasi

Dalam kampanyenya, Trump menjanjikan pembangunan tembok perbatasan di wilayah AS-Meksiko dan penghentian program *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA). Meskipun sekitar 450 mil tembok telah dibangun, implementasi penuh terhambat oleh penolakan kongres dan tantangan hukum. Program DACA tetap berjalan, menunjukkan adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersifat konfrontatif terhadap isu imigrasi.

3. Perdagangan: Revisi NAFTA ke USMCA

Perubahan perjanjian NAFTA menjadi USMCA bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih menguntungkan bagi pekerja dan industri AS. Perjanjian baru ini mencakup peningkatan perlindungan untuk sektor otomotif dan pertanian AS, namun dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan masih diperdebatkan, mengingat perjanjian tersebut membawa implikasi terhadap rantai pasok global.

4. Kesehatan

Trump mengkampanyekan penghapusan *Affordable Care Act* (ACA), namun upaya ini menghadapi penolakan yang signifikan dari Kongres dan hukum. ACA tetap berlaku dengan perubahan minor, yang melindungi lebih dari 23 juta pengguna pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan keterbatasan dalam merealisasikan kebijakan kesehatan yang kompleks dan kontroversial.

5. Energi dan Lingkungan

Kebijakan Trump di sektor energi mencakup keluarnya AS dari *Paris Agreement* dan deregulasi besar-besaran terhadap industri energi, dengan lebih dari 150 regulasi lingkungan dicabut. Kebijakan ini memberikan dorongan pada industri bahan bakar fosil, namun memicu kekhawatiran global terhadap komitmen AS dalam menangani perubahan iklim.

6. Kebijakan Luar Negeri dan Perlindungan Pekerja

Trump berupaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja domestik melalui kebijakan *anti-outsourcing*. Selain itu, kebijakan luar negeri seperti pengurangan pasukan militer AS dari Timur Tengah diimplementasikan secara terbatas, dengan 2.500 pasukan tersisa di Afghanistan pada akhir 2020. Langkah ini mencerminkan kebutuhan stabilitas strategis yang terus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan luar negeri AS.

Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan pola implementasi yang terkadang tidak sejalan sepenuhnya dengan janji kampanye, baik karena hambatan politik domestik maupun dinamika global yang kompleks. Analisis terhadap dampak kebijakan Trump ini memberikan wawasan penting tentang tantangan dalam merealisasikan agenda kebijakan yang ambisius di tengah tekanan politik, sosial, dan ekonomi.

Kebijakan Trump di Luar Kampanye: Dampak dan Realisasi

Selama masa kepemimpinan Donald Trump (2017–2021), sejumlah kebijakan yang tidak tercantum dalam janji kampanye berhasil diimplementasikan dan membawa dampak signifikan bagi dinamika ekonomi global. Kebijakan-kebijakan ini, yang mencakup perang dagang, subsidi domestik, hingga pembatalan perjanjian internasional, merefleksikan pendekatan yang pragmatis terhadap tantangan politik dan ekonomi, meskipun sering kali kontroversial (Appendix 2). Berikut adalah ringkasan kebijakan yang terealisasi:

1. Tarif Impor pada Barang Asal Tiongkok

Pemerintah Trump memberlakukan tarif tinggi hingga 25% pada barang-barang impor dari Tiongkok senilai sekitar USD 200 miliar per tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat dan mengurangi defisit perdagangan. Langkah ini berhasil diimplementasikan sepenuhnya antara 2019 dan 2020. Namun, tarif ini memicu perang dagang dengan Tiongkok, yang memberikan dampak lanjutan pada rantai pasok global dan meningkatkan ketidakpastian di pasar internasional.

2. Subsidi kepada Petani Terdampak Perang Dagang

Sebagai respons terhadap dampak balasan tarif dari Tiongkok terhadap produk agrikultur Amerika, pemerintah memberikan subsidi senilai USD 28 miliar kepada petani selama periode 2018–2020. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi pendapatan petani dan meredam dampak negatif dari perang dagang terhadap sektor agrikultur domestik.

3. Pembatalan Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA)

Pada tahun 2018, Trump menarik Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA), yang bertujuan membatasi program nuklir Iran. Selain itu, sanksi ekonomi ketat diterapkan kembali, yang memperburuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Langkah ini berhasil direalisasikan sepenuhnya dan memberikan dampak signifikan pada pasar energi global serta stabilitas regional.

4. *Operation Warp Speed* (Pengembangan Vaksin COVID-19)

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan *Operation Warp Speed*, dengan lebih dari USD 2 triliun dialokasikan untuk

mendukung pengembangan dan distribusi vaksin. Kebijakan ini memungkinkan percepatan produksi vaksin secara global, memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan dunia pada tahun 2020.

5. Pembatalan Net Neutrality

Pada tahun 2017, *Federal Communications Commission* (FCC) membatalkan regulasi net neutrality, memberikan penyedia layanan internet (ISP) kontrol lebih besar atas lalu lintas internet. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan tentang aksesibilitas internet yang adil, meskipun sepenuhnya direalisasikan.

6. Pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem

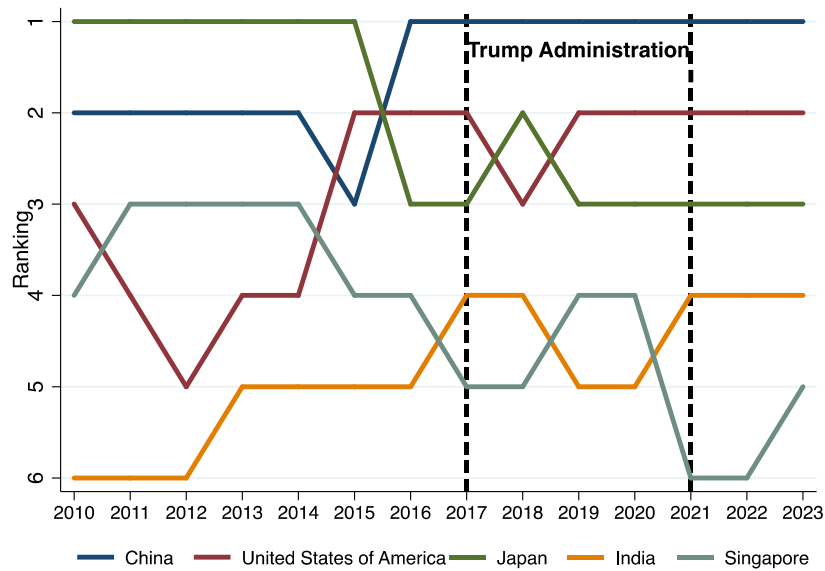
Pada Mei 2018, Trump memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel. Langkah ini mengundang respons beragam dari komunitas internasional, memperkuat hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi memicu ketegangan di Timur Tengah.

Kebijakan-kebijakan di luar kampanye ini menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas pemerintahan Trump terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi global. Meskipun banyak kebijakan yang berhasil direalisasikan sepenuhnya, dampaknya tidak selalu positif, terutama dalam konteks ketidakpastian global yang meningkat. Analisis terhadap kebijakan ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pendekatan unilateral dapat memengaruhi stabilitas dan hubungan internasional.

Gangguan Perdagangan dan Sektor Riil

Selama administrasi Trump pertama, proteksionisme yang meningkat dan kebijakan perdagangan sepihak menyebabkan penurunan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) sebesar ~8,72% pada tahun 2018. Penurunan ini, meskipun kemudian diimbangi oleh pemulihan volume perdagangan, mengungkapkan kerentanan Indonesia terhadap guncangan eksternal. AS pun secara konsisten menjadi mitra perdagangan Indonesia terbesar nomor dua, kecuali di saat Trump menyatakan akan melakukan *trade war* dengan Tiongkok pada tahun 2018, dimana posisi AS menurun menjadi mitra dagang terbesar ketiga untuk Indonesia (Exhibit 1).

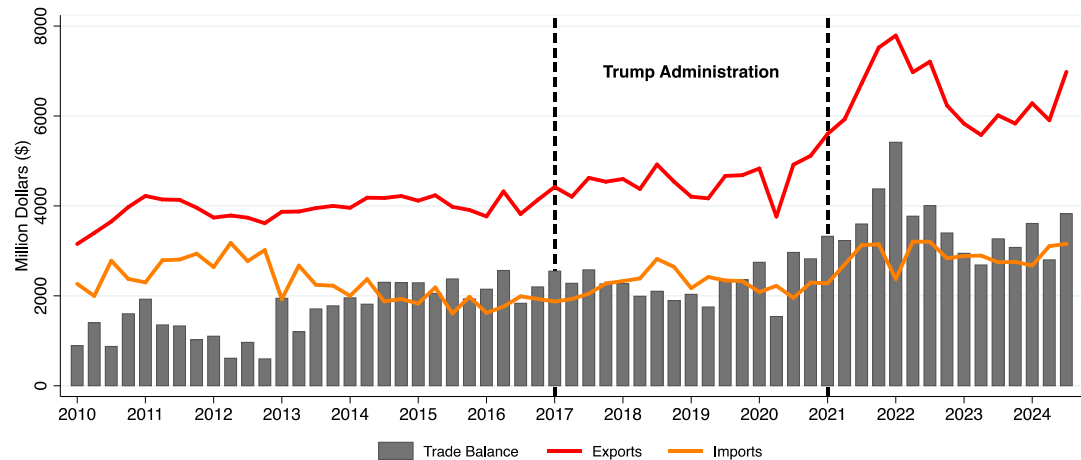
Exhibit 1. Negara-negara Tujuan Ekspor Utama Indonesia pada Masa Pemerintahan Trump, 2010-2023



Source: Trade Map, IFGP Research Analysis

Grafik nilai perdagangan bilateral antara Indonesia – AS pada Exhibit 2 menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mempertahankan posisi *net-export*, stagnasi nilai ekspor di bawah administrasi Trump pada periode administrasi pertamanya sangat kontras dengan pertumbuhan moderat yang diamati selama kepresidenan Joe Biden pada tahun 2021 - 2024. Namun, jika administrasi kedua Trump akan mengganggu aliran *net-export* dari Indonesia ke AS, maka pertumbuhan ekonomi riil Indonesia dapat terganggu (Exhibit 2).

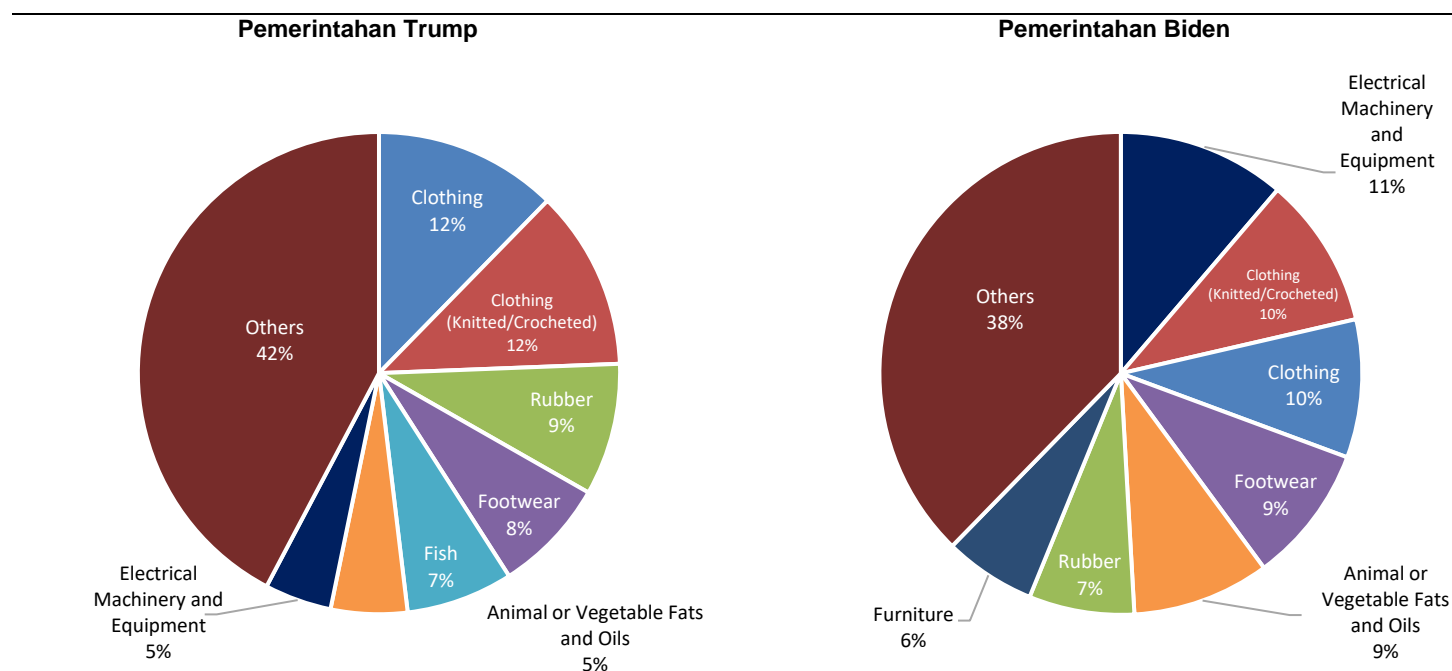
Exhibit 2. Nilai Perdagangan Bilateral Indonesia dan AS, 2010-2024



Source: Trade Map, IFGP Research Analysis

Selain itu, jika pergeseran komposisi ekspor dielaborasi, kategori barang bernilai tambah relatif rendah seperti karet dan pakaian mendominasi ekspor Indonesia ke AS selama masa administrasi pertama Trump, dibandingkan dengan peningkatan ekspor barang dengan *value added* yang relatif lebih tinggi seperti mesin listrik di bawah Biden. Hal ini mengimplikasikan bahwa ke depannya, barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi berpotensi untuk lebih sulit diekspor ke AS dikarenakan adanya implementasi pengenaan tarif impor dari Indonesia, sehingga ancaman disrupsi perdagangan perlu diperhatikan pada masa kepemimpinan Trump berikutnya (Exhibit 3).

Exhibit 3. Produk Ekspor Utama Indonesia ke AS pada Masa Pemerintahan Trump dan Biden



Source: Trade Map, IFGP Research Analysis

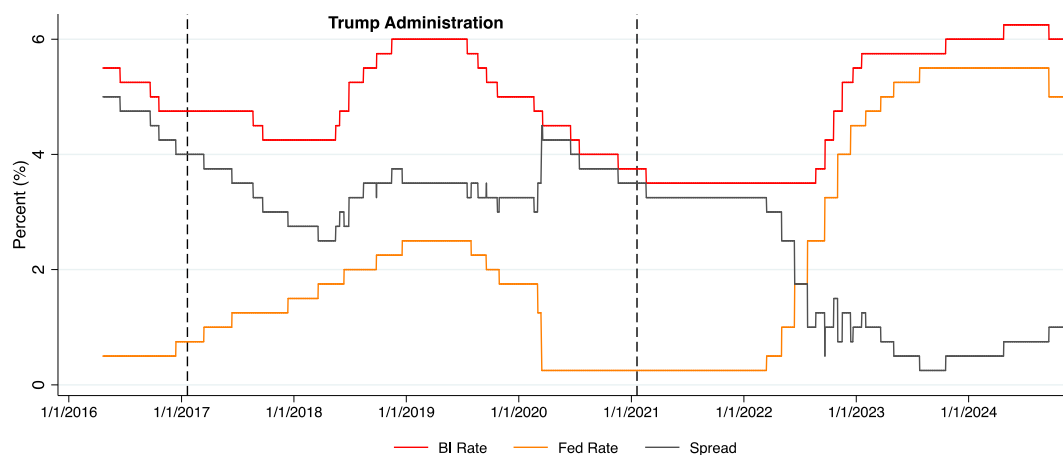
Administrasi kedua Trump kemungkinan akan membawa kembali tarif atau hambatan non-tarif yang memperburuk ketergantungan Indonesia pada ekspor bernilai rendah. Kebijakan seperti ini dapat menyebabkan peningkatan pengangguran di sektor padat karya pada tahun 2026. Untuk mengurangi risiko ini, Indonesia harus fokus pada diversifikasi pasar ekspor, khususnya di ASEAN dan Uni Eropa, serta berinvestasi dalam peningkatan rantai nilai untuk mendorong ekspor bernilai tinggi.

Selain dari sektor ekonomi riil, sektor keuangan global maupun di Indonesia juga perlu diperhatikan dengan akan dimulainya masa kepemimpinan Trump untuk periode kedua. Sektor keuangan diyakini akan lebih volatil dikarenakan transmisi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Berikut beberapa indikator sektor keuangan di Indonesia yang diyakini akan terdampak dengan kebijakan-kebijakan Trump periode kedua:

Tekanan Suku Bunga

Pemotongan pajak pada masa administrasi Trump pertama menyebabkan tekanan inflasi di AS, memaksa Federal Reserve AS (The Fed) mengadopsi sikap kebijakan moneter yang lebih ketat. Siklus pengetatan ini secara signifikan memengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), yang harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas arus modal. Penyesuaian kebijakan ini, meskipun diperlukan, membatasi pertumbuhan domestik. Sebaliknya, lingkungan inflasi yang lebih terkendali selama pemerintahan Biden memungkinkan BI mengadopsi kebijakan yang lebih akomodatif, yang mendukung pemulihan ekonomi (Exhibit 4).

Exhibit 4. Nilai Perdagangan Bilateral Indonesia dan AS, 2010-2024



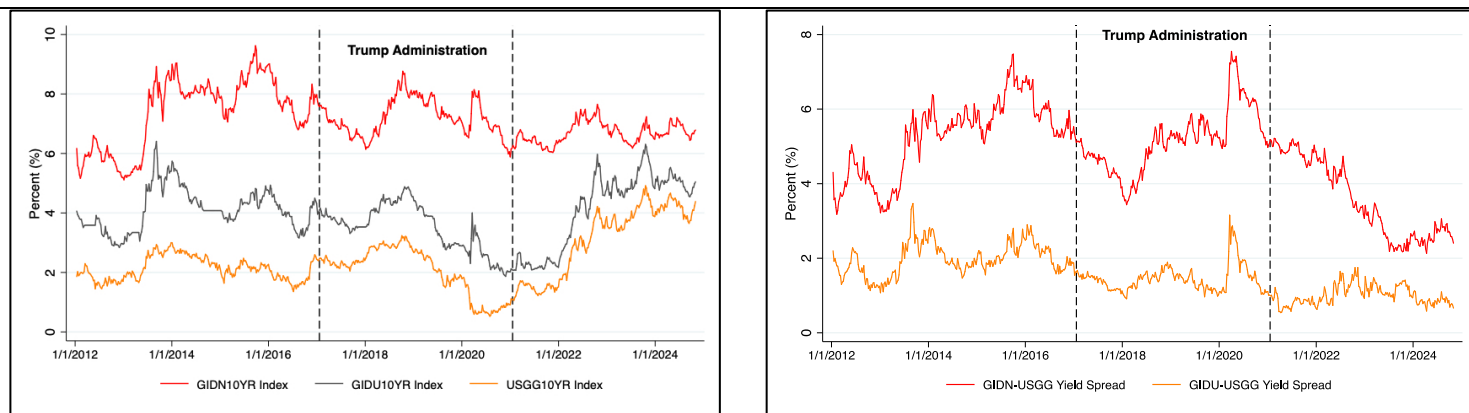
Source: Bloomberg, IFGP Research Analysis

Jika administrasi kedua Trump menerapkan pemotongan pajak serupa, inflasi yang dihasilkan dapat memicu siklus kenaikan suku bunga The Fed lainnya. BI kemungkinan perlu mengikuti langkah ini, menjaga suku bunga tetap tinggi untuk menghindari arus modal keluar, yang dapat menekan ekspansi ekonomi. Disiplin fiskal yang lebih kuat dan akumulasi cadangan devisa akan menjadi kunci untuk melindungi Indonesia dari tekanan eksternal ini.

Imbal Hasil (Yield) Obligasi Pemerintah dan Spread Imbal Hasil

Exhibit 5 menggambarkan perbedaan imbal hasil obligasi pemerintah antara Indonesia dan AS selama administrasi Trump pertama. Ekspansi fiskal Trump, yang dibiayai oleh peningkatan penerbitan obligasi Treasury, mendorong imbal hasil AS lebih tinggi. Indonesia merespons dengan menaikkan imbal hasil obligasinya untuk mempertahankan spread kompetitif, sehingga menarik investasi asing. Di bawah administrasi Joe Biden, lingkungan imbal hasil yang relatif stabil mengurangi volatilitas arus modal dan meningkatkan sentimen investor terhadap pasar negara berkembang.

Exhibit 5. Imbal Hasil dan Spread Obligasi Pemerintah Indonesia dan AS, 2012-2024



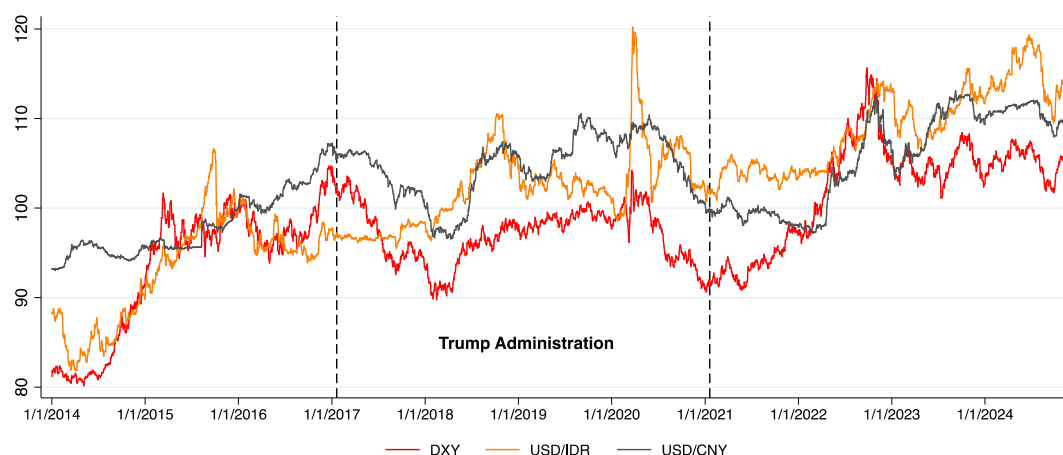
Source: Bloomberg, IFGP Research Analysis

Dalam administrasi Trump kedua, pelebaran spread imbal hasil AS-Indonesia dapat menghalangi investor asing untuk membeli obligasi Indonesia. Skenario seperti ini dapat melemahkan Rupiah dan meningkatkan biaya pinjaman. Pembuat kebijakan harus secara proaktif mengelola risiko ini dengan mendiversifikasi sumber pendanaan dan menjaga stabilitas makroekonomi untuk meyakinkan investor.

Volatilitas Nilai Tukar

Dinamika nilai tukar selama masa jabatan Trump pertama ditampilkan pada Exhibit 6, di mana apresiasi dolar AS memberikan tekanan signifikan pada Rupiah Indonesia. Hal ini didorong oleh perang dagang dan kebijakan fiskal ekspansif yang mendukung kekuatan dolar AS. Namun, dampaknya pada Rupiah dapat dimitigasi oleh penerapan tarif yang lebih moderat dari perkiraan. Di bawah administrasi Biden, lingkungan perdagangan global yang lebih stabil berkontribusi pada pengurangan volatilitas mata uang, yang meringankan tekanan pada neraca eksternal Indonesia.

Exhibit 6. Nilai Tukar Indeks Dolar, Rupiah Indonesia, dan Yuan Tiongkok pada Masa Pemerintahan Trump



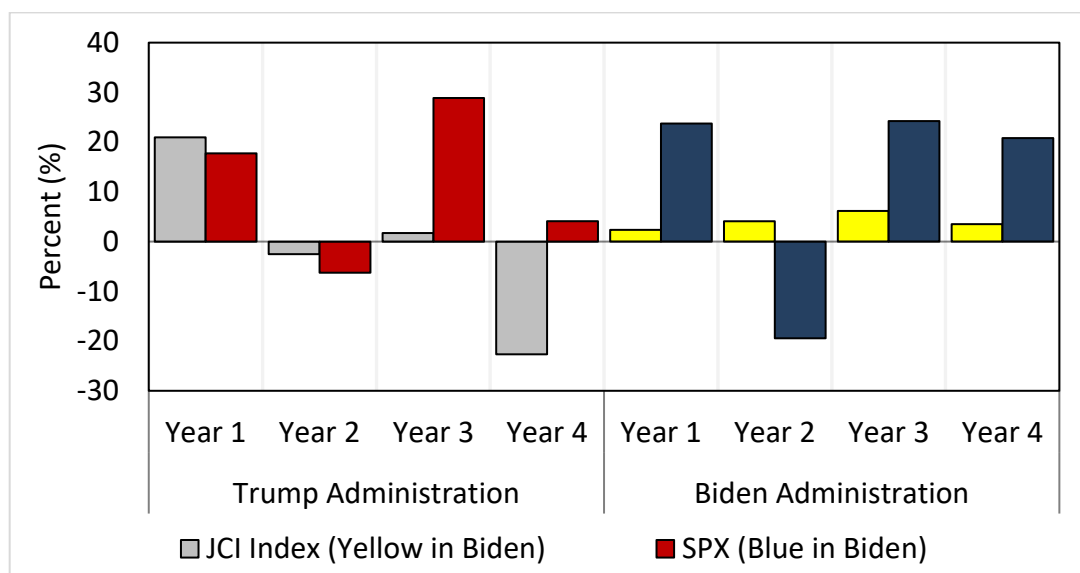
Source: Bloomberg, IFGP Research Analysis

Pada administrasi Trump kedua, dengan kombinasi ketegangan perdagangan yang diperbarui dan ekspansi fiskal, dolar AS akan dapat semakin menguat dan menambah tekanan pada Rupiah. Indonesia harus bersiap menghadapi potensi fluktuasi nilai tukar dengan memperkuat cadangan devisa dan mengejar strategi lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko yang terkait dengan depresiasi mata uang.

Volatilitas Pasar Saham

Pasar ekuitas global menunjukkan return yang beragam selama masa jabatan Trump di administrasi pertamanya. Ketika indeks S&P 500 mencatat kenaikan signifikan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami volatilitas yang cukup tinggi. IHSG menunjukkan kinerja yang kuat pada tahun pertama masa Trump di administrasi pertamanya, tetapi tahun-tahun berikutnya ditandai oleh ketidakstabilan yang meningkat akibat gesekan perdagangan dan kenaikan suku bunga. Sebaliknya, pendekatan pemerintahan Biden terhadap kebijakan perdagangan dan moneter mendorong stabilitas pasar yang lebih besar, yang relatif lebih menguntungkan lanskap pasar modal Indonesia (Exhibit 7).

Exhibit 7. Kinerja S&P500 dan IHSG pada Masa Pemerintahan Trump dan Biden



Source: Bloomberg, IFGP Research Analysis

Administrasi Trump periode kedua dapat memicu kembali volatilitas di pasar saham Indonesia, khususnya pada tahun 2026. Kebijakan yang mendukung kemandirian energi AS dapat menekan harga minyak global, yang berdampak negatif pada sektor energi Indonesia. Namun, sektor seperti barang konsumsi dapat menarik investasi defensif, memberikan penyangga terhadap ketidakstabilan pasar yang lebih luas.

Kampanye Trump 2024: Analisis Kebijakan dan Potensi Realisasi

Pemilihan kembali Donald Trump sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat pada 2024 membawa sejumlah janji kebijakan yang merefleksikan pendekatan proteksionis dan konservatif yang menjadi ciri khas kepemimpinan Trump sebelumnya (2017–2021). Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari imigrasi, ekonomi, energi, hingga pertahanan, dengan fokus utama pada agenda domestik "*America First*" (Exhibit 8). Berikut ini adalah analisis janji kampanye dan kemungkinan realisasinya:

1. Kebijakan Imigrasi

Janji kampanye Trump untuk melanjutkan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, memperketat kebijakan suaka (*refugee*), dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal mencerminkan komitmennya pada pengendalian imigrasi yang ketat. Mengingat keberhasilan parsial pada masa jabatan pertamanya, kemungkinan kebijakan ini terealisasi cukup besar, meskipun menghadapi tantangan hukum dan oposisi politik yang signifikan.

2. Kebijakan ekonomi

Penerapan tarif universal pada barang impor, terutama dari Tiongkok, merupakan lanjutan dari kebijakan proteksionis Trump sebelumnya. Pada periode pertama, tarif tinggi diberlakukan untuk melindungi industri domestik, namun besarnya kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan janji kampanye. Kebijakan ini diharapkan memberikan keuntungan bagi sektor manufaktur AS, meskipun dapat memperburuk ketegangan perdagangan global.

3. Kebijakan Luar Negeri

Trump berjanji untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik luar negeri, termasuk mempertimbangkan penarikan dari NATO. Namun, kebijakan ini dinilai memiliki kemungkinan realisasi yang rendah mengingat potensi penolakan dari dalam negeri dan sekutu AS. Pendekatan ini menunjukkan preferensi terhadap pengurangan intervensi luar negeri untuk fokus pada prioritas domestik.

4. Kebijakan Energi

Kebijakan Trump dalam meningkatkan produksi bahan bakar fosil dan membatalkan insentif iklim menunjukkan keberpihakannya pada sektor energi tradisional. Kebijakan ini mencerminkan keinginan untuk mencapai kemandirian energi AS dan melanjutkan deregulasi lingkungan, sebagaimana telah dilakukan selama masa jabatan pertamanya.

5. Kebijakan Pertahanan

Trump berencana membangun sistem pertahanan rudal generasi baru dengan peningkatan anggaran militer, yang ditujukan untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok dan Rusia. Mengingat tren peningkatan anggaran militer selama masa jabatannya sebelumnya, kebijakan ini memiliki peluang besar untuk direalisasikan.

6. Pembangunan Kembali Amerika

Trump kembali menjanjikan "era keemasan baru" dengan fokus pada kebijakan pro-ekonomi domestik dan prinsip "*America First*". Slogan "*Make America Great Again*" mencerminkan kesinambungan dari kebijakan sebelumnya, dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan penguatan kedaulatan AS di panggung internasional.

Kebijakan kampanye Trump pada pemilihan presiden AS tahun 2024 menunjukkan konsistensi dengan pendekatan proteksionisme ekonomi, konservatisme sosial, dan penguatan kapabilitas domestik. Namun, beberapa kebijakan luar negeri yang lebih radikal, seperti kemungkinan keluar dari NATO, menghadapi tantangan signifikan dari segi dukungan politik dan diplomasi internasional. Analisis ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kebijakan Trump dapat membentuk kembali arah perekonomian dan politik global, dengan dampak yang beragam terhadap stabilitas geopolitik dan pasar internasional.

Exhibit 8: Daftar Kebijakan yang Dikampanyekan oleh Donald Trump pada Pemilihan Presiden AS Periode 2025-2029

Kebijakan	Janji Kampanye	Kemungkinan Terjadi
Kebijakan Imigrasi	Melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, memperketat kebijakan suaka, serta melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.	More Likely - Trump sangat fokus pada kebijakan imigrasi di masa jabatan sebelumnya dan berhasil membangun sebagian tembok. Ini menunjukkan komitmen kuat pada isu ini, sehingga kemungkinan terealisasi cukup besar.
Kebijakan Ekonomi	Menerapkan tarif universal pada barang impor, terutama dari China, untuk melindungi industri dalam negeri.	More Likely - Selama masa jabatan pertamanya, Trump menerapkan tarif tinggi pada China dan negara-negara lain. Namun, besaran dari tariff yang akan ditetapkan cenderung akan lebih rendah daripada yang dijanjikan pada masa kampanye.
Kebijakan Luar Negeri	Mengakhiri keterlibatan AS dalam konflik di Ukraina dan mempertimbangkan penarikan dari NATO.	Less Likely - Meskipun Trump cenderung ingin mengurangi keterlibatan AS di luar negeri, penarikan dari NATO akan mendapat banyak penolakan dari dalam negeri dan sekutu AS, membuat kemungkinan terealisasi lebih kecil.
Kebijakan Energi	Meningkatkan produksi bahan bakar fosil dan membatalkan insentif iklim yang diterapkan sebelumnya.	More Likely - Trump membatalkan banyak regulasi lingkungan selama masa jabatan pertamanya, dan dia cenderung akan melanjutkan kebijakan pro-fosil ini, terutama karena keinginan untuk mencapai kemandirian energi.
Kebijakan Sosial	Mengusulkan larangan federal terhadap perawatan afirmatif gender untuk anak di bawah umur dan menerapkan kebijakan "Don't Say Gay" secara nasional.	More Likely - Trump menunjukkan dukungan untuk kebijakan konservatif di masa jabatannya, dan dengan dukungan dari basis konservatif, kemungkinan kebijakan ini akan dia dorong. Namun, implementasinya mungkin terbatas oleh undang-undang negara bagian.
Kebijakan Pertahanan	Membangun perisai pertahanan rudal generasi baru dan meningkatkan anggaran Pentagon.	More Likely - Selama masa jabatannya, Trump telah meningkatkan anggaran militer, menunjukkan kecenderungannya untuk memperkuat pertahanan AS, terutama terhadap ancaman

dari China dan Rusia.

**Pembangunan
Kembali
Amerika**

Menjanjikan "era keemasan baru" untuk Amerika dengan fokus pada kebijakan pro-ekonomi domestik dan "America First".

More Likely - Trump sudah mengusung slogan "Make America Great Again" di masa jabatan sebelumnya dan akan melanjutkan fokus pada kebijakan yang memprioritaskan ekonomi domestik dan kedaulatan AS.

Source: Various Sources

Kesimpulan

In summary, Administrasi Trump kedua menghadirkan risiko makroekonomi yang signifikan bagi Indonesia, mulai dari gangguan perdagangan hingga volatilitas pasar keuangan. Dengan menganalisis tren masa lalu dan arah kebijakan potensial, *paper* ini menekankan perlunya Indonesia untuk mengadopsi langkah-langkah proaktif agar dapat melindungi stabilitas ekonomi. Diversifikasi ekspor, penguatan ketahanan finansial, dan percepatan investasi pada barang bernilai tinggi dan energi terbarukan akan menjadi kunci untuk menghadapi ketidakpastian pergeseran ekonomi global. Intervensi kebijakan yang strategis dan perencanaan ekonomi yang matang akan memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah potensi guncangan eksternal.

Appendix

Appendix 1. Daftar Kebijakan yang Dikampanyekan serta Realisasinya oleh Donald Trump pada tahun 2017-2020

Kebijakan	Janji Kampanye	Realisasi	Data Aktual	Terealisasi Sepenuhnya?	Alasan Tidak Sepenuhnya	Tahun Realisasi
Ekonomi dan Perpajakan	Melakukan pemotongan pajak signifikan untuk perusahaan dan warga AS guna merangsang ekonomi	Pemotongan pajak korporasi sebesar 21% berhasil diterapkan, namun dampak pada individu lebih terbatas.	Pajak korporasi turun dari 35% ke 21%	Tidak sepenuhnya	Fokus pemotongan pada perusahaan besar, dan dampak pemotongan pajak individu tidak menyeluruh.	2018
Reformasi Imigrasi	Membangun tembok perbatasan penuh di AS-Meksiko dan mengakhiri program DACA	Sekitar 450 mil tembok dibangun, namun DACA tetap berjalan akibat tantangan hukum dan penolakan politik.	50 mil tembok dari 2000 mil rencana awal	Tidak sepenuhnya	Penolakan Kongres dan tuntutan hukum menghambat dana dan penghapusan DACA sepenuhnya.	2017-2020
Perdagangan: NAFTA ke USMCA	Meninjau ulang NAFTA untuk memastikan perjanjian lebih menguntungkan bagi pekerja dan industri AS	NAFTA direvisi menjadi USMCA, dengan perubahan yang mendukung industri otomotif, perlindungan hak pekerja, dan akses pasar pertanian AS yang lebih besar.	Penyesuaian tarif mobil, komitmen perlindungan hak pekerja di Meksiko, dan peningkatan ekspor produk susu ke Kanada	Tidak sepenuhnya	Perjanjian baru meningkatkan perlindungan di beberapa sektor, tetapi dampaknya terhadap ekonomi AS secara keseluruhan masih diperdebatkan.	2020
Kesehatan	Mencabut Affordable Care Act (ACA) dan menghapus mandate asuransi individu	ACA tidak dicabut, tetapi mandat individu dihapus; ACA tetap melindungi 23 juta pengguna.	ACA tetap berlaku dengan 23 juta pengguna (2020)	Tidak sepenuhnya	Penolakan di Kongres dan tantangan hukum yang kuat mencegah penghapusan ACA.	Tetap ada (2020)
Energi dan Lingkungan	Keluar dari Kesepakatan Paris dan menderegulasi industri energi, mendukung fosil	AS keluar dari Paris Agreement; 150+ regulasi lingkungan dipangkas, mendukung energi fosil	100+ regulasi lingkungan dipangkas	Sepenuhnya	-	2020
Penunjukan Hakim Konservatif	Mengisi kekosongan Mahkamah Agung dengan hakim konservatif untuk mempertahankan nilai tradisional	Trump menunjuk tiga hakim konservatif: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett.	Hakim baru: Gorsuch, Kavanaugh, Barrett	Sepenuhnya	-	2017-2020
Perlindungan Pekerja Amerika	Melindungi lapangan kerja AS dari outsourcing dan menciptakan lebih banyak pekerjaan domestik	Kebijakan tarif membantu pekerjaan manufaktur; perang dagang memberi dampak negatif pada pertanian.	500 ribu pekerjaan manufaktur tercipta sebelum pandemi	Tidak sepenuhnya	Tarif berdampak negatif pada sektor pertanian dan beberapa industri yang bergantung pada rantai pasokan global.	2018-2020
Kebijakan Luar Negeri	Mengakhiri perang tanpa akhir dan mengurangi kehadiran militer AS di luar negeri	Trump menarik sebagian pasukan dari Afghanistan dan Irak, tetapi keterlibatan di luar negeri tetap ada.	2.500 pasukan tersisa di Afghanistan (2020)	Tidak sepenuhnya	Pertimbangan keamanan nasional dan kebutuhan stabilitas di beberapa wilayah mencegah penarikan penuh.	2019-2020

Source: Various Sources

Notes: Highlight merah menandakan kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian dunia.

Appendix 2: Daftar Kebijakan yang Tidak Disebutkan Dalam Kampanye oleh Donald Trump pada tahun 2017-2020


Kebijakan	Janji Kampanye	Realisasi	Data Aktual	Terealisasi Sepenuhnya?	Tahun Realisasi
Tarif Impor pada Barang Tiongkok	Tidak dijanjikan	Tarif tinggi dikenakan pada barang China untuk melindungi industri AS dan mengurangi defisit perdagangan.	Tarif dikenakan pada impor barang China senilai sekitar \$200miliar per tahun (25% tax rate naik dari 10%)	Sepenuhnya	2019-2020
Subsidi kepada Petani Terdampak Perang Dagang	Tidak dijanjikan	Subsidi diberikan untuk petani yang terdampak balasan tarif dari China, melindungi pendapatan mereka.	\$28 miliar subsidi bagi petani (2018-2020)	Sepenuhnya	2018-2020
Pembatalan Perjanjian Nuklir Iran (JCPOA)	Tidak dijanjikan	Trump menarik AS dari JCPOA, menerapkan kembali sanksi ekonomi yang ketat pada Iran.	AS keluar dari JCPOA pada 2018	Sepenuhnya	2018
Operation Warp Speed (Pengembangan Vaksin COVID-19)	Tidak dijanjikan	Pemerintah meluncurkan Operation Warp Speed untuk mempercepat pengembangan vaksin COVID-19.	Lebih dari \$2 triliun dialokasikan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19	Sepenuhnya	2020
Pembatalan Net Neutrality	Tidak dijanjikan	FCC membatalkan regulasi net neutrality, memberi ISP kontrol lebih besar pada lalu lintas internet.	Net neutrality dibatalkan pada 2017	Sepenuhnya	2017
Pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem	Tidak dijanjikan	Trump memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai ibu kota Israel.	Kedutaan dipindahkan pada Mei 2018	Sepenuhnya	2018


Source: Various Sources

Notes: *Highlight* merah menandakan kebijakan yang dapat berpengaruh pada perekonomian dunia.

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)


Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

 (+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group

 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero

 @indonesiafinancialgroup

 @ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan